

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

2.1.1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan berasal dari Bahasa Inggris yaitu *policy* yang diterapkan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor, seperti pejabat, suatu kelompok maupun suatu Lembaga pemerintah atau sejumlah aktor dalam bidang kegiatan tertentu.

Menurut Friedrich (dalam Agustino 2016:16) menyatakan bahwa kebijakan adalah:

“Kebijakan adalah sebagai salah satu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan hambatan dan peluang peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan atau mengatasi dalam mencapai suatu tujuan atau merealisasi suatu sasaran dengan maksud tertentu”

Jones (dalam Winarno 2012:19) menjelaskan bahwa Kebijakan adalah digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda.

Pada saat ini adalah kebijakan lebih sering dasar luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan tindakan atau kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya. Kebijakan sering diartikan sebagai suatu rangkaian rekomendasi pemerintah untuk menghadapi permasalahan yang ada di lapangan.

2.1.2. Pengertian Publik

Dalam percakapan sehari-hari, publik dibagi menjadi dua arti. Pertama, publik diartikan sebagai negara atau pemerintah seperti dalam terjemahan *public administration* menjadi administrasi negara. Kedua, publik merupakan kata padanan dari kata ‘umum’ seperti dalam *public telephone* (telepon umum), *public interest* (kepentingan umum), *public transportation* (transportasi umum).

Secara etimologis publik diserap dari Bahasa Inggris yaitu *public* yang sangat erat kaitannya dengan segala sesuatu yang menyangkut masyarakat atau orang banyak.

2.1.3. Pengertian Kebijakan Publik

Setelah memahami pengertian kebijakan dan publik, maka selanjutnya menguraikan kebijakan publik itu sendiri. Karena pada dasarnya kebijakan publik berbeda dengan kebijakan *private*.

Menurut William I. Jenkins (dalam Agustino 2016:17) menyatakan bahwa kebijakan public merupakan :

“Seperangkat posisi yang saling terkait yang diambil oleh seorang aktor politik atau aktor-aktor mengenai pemilihan tujuan dalam cara mencapainya pada situasi tertentu di mana keputusan tersebut harus dilaksanakan, pada prinsipnya, berada dalam kekuatan para aktor untuk mencapainya” (*Jenkins 1978:4*)

Menurut Eyestone (dalam Winarno 2012:20) adalah hubungan dari satu unit pemerintah dengan lingkungannya.

Dalam kaitanya dengan definisi-definisi yang disebutkan diatas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu kebijakan publik.

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditunjukkan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah atau acak;
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Seperti suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya;
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, inflasi atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. ini artinya kebijakan publik memperhatikan apa yang kemudian akan atau dapat terjadi setelah kebijakan ini diimplementasikan;
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan apabila positif. namun, jika negatif kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal

dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah sangat sangat diperlukan;

5. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

2.1.4. Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menarik minat untuk mengkaji kebijakan publik melalui proses proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. namun demikian, beberapa hal yang mungkin membuat kita tahu ini dengan urutan yang berbeda.

Menurut Winarno (2016:28-30) proses pembuatan kebijakan yaitu melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam Agenda kebijakan. pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. sama halnya dengan perjuangan suatu masalah masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. pada tahap ini masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan didukung dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan catatan, jika program tersebut tidak di implementasikan. oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap Penilaian Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. dalam hal ini, memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. oleh, tentukanlah ukuran ukuran atau Kriteria kriteria yang menjadi dasar untuk menilai Apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

2.2. Implementasi Kebijakan

2.2.1. Implementasi

Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama.

Menurut Syukur (dalam Surmayadi 2005 : 79) mengemukakan:

“ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang sedang dilaksanakan (2) kelompok sasaran, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan untuk manfaat dari program, perubahan atau perbaikan (3) menerapkan elemen (Pelaksana) baik untuk organisasi atau individu yang bertanggung jawab untuk memperoleh pelaksanaan dan pengawasan proses implementasi”

2.2.2. Implementasi Kebijakan

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Menurut Ripley dan Franklin (dalam Winarno 2012:148) mendefinisikan :

“Implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran nyata.”

Sedangkan menurut Van Meter & Van Horn (dalam Agustino, 2016:128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai :

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Menurut Barret (dalam Agustino, 2016:128) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan :

“... translating policy into action”

(... menerjemahkan kebijakan kedalam tindakan)

Berdasarkan uraian-uraian tersebut bahwa implementasi kebijakan adalah menjalankan konten atau isi kebijakan kedalam aplikasi yang dinamakan kebijakan itu sendiri dan juga merupakan suatu proses dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

2.2.3. Model-Model Implementasi Kebijakan

2.2.3.1. Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

Model implementasi kebijakan yang berperspektif *top-down* dikembangkan oleh George C. Edward III (Agustino, 2016:136-141). Model ini biasa disebut dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Impementation*. Dalam model ini, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi.

Komunikasi, menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga Setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada bagian personalia yang tepat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu:

- a. transmisi; saluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu informasi yang baik pula seringkali terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi) hal ini

disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu. Namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
- c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten untuk diterapkan dan dijalankan. karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Variabel kedua yaitu sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, Menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator-indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu:

- a. Staf; sumber daya utama dalam mengimplementasikan kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidang.
- b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. implementor harus mengetahui apakah orang lain terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar pemerintah dapat dilaksanakan.

kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak ter legitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

- d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung atau sarana prasarana maka bila mentasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik pada model ini adalah disposisi.

disposisi atau 'sikap dari pelaksana kebijakan' adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik.

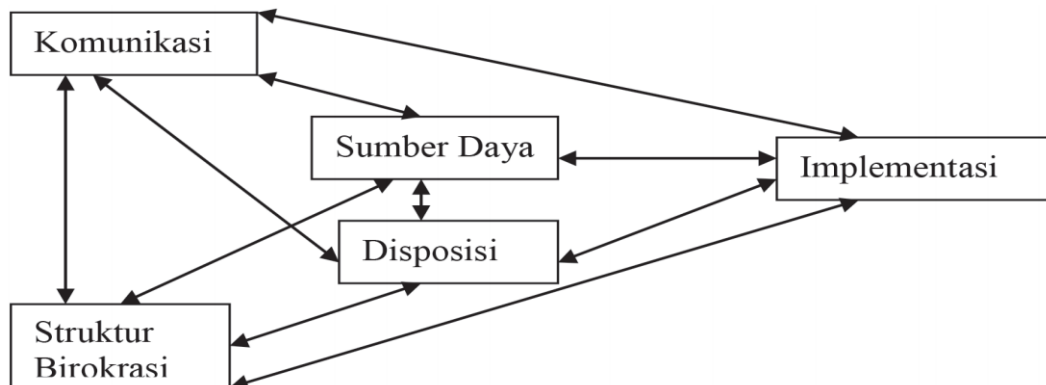
- a. Efek disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.
- b. Melakukan pengaturan birokrasi; implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya.
- c. Insentif; model ini menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan pada pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif

Variabel keempat menurut model ini yaitu struktur birokrasi. bangun sumberdaya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan

untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Menurut model ini terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik, yaitu:

- a. Membuat standard operating procedures (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, dan birokrat untuk melaksanakan kegiatan kegiatannya setiap harinya Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- b. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.



Gambar 2.1

Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

2.2.3.2. Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle

Pendekatan model ini dikenal dengan nama *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle (Agustino, 2016:142) keberhasilan suatu investasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih).

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle (dalam Agustino, 2016:143-146) juga amat ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context Of Policy*:

A. *Content of Policy* menurut Grindle adalah:

- a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Interest Affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui.

b. *Type of Benefits* (tipe manfaat)

Pada poin ini *Content of Policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of Policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, makapada bagian ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan,

e. *Program Implementor* (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya betj alan dengan baik.

B. *Context of Policy* menurut Grindle adalah:

a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*
(kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak di implementasikan akan jauh arang dari api.

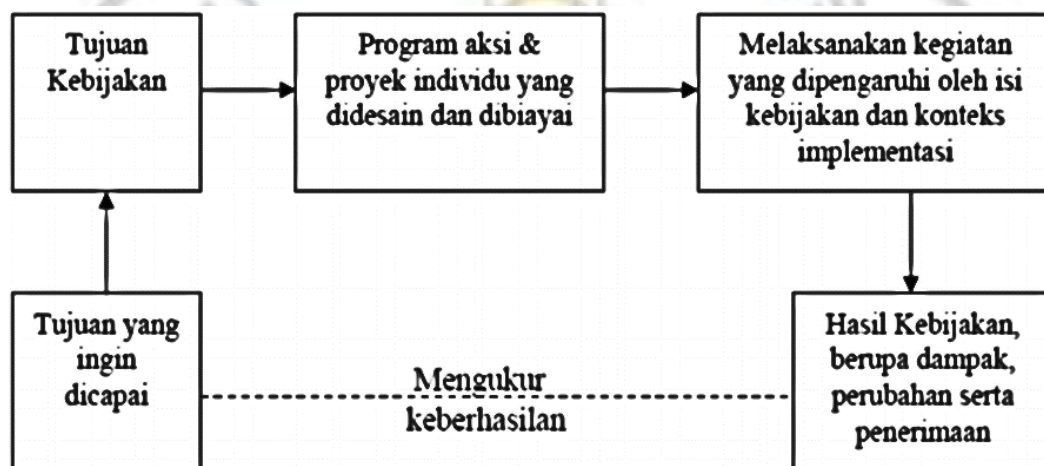
b. *Institution Characteristic* (karakteristik lembaga)

Lingkungan di mana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal ini yang di rasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan repon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.



Gambar 2.2

Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

2.2.4. Faktor-Faktor Penentu Implementasi Kebijakan

Faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan (Agustino 2016: 156-161) yaitu:

1. Respeknya Anggota Masyarakat Pada Otoritas Dan Keputusan Pemerintah

Kodrat manusia, bila merujuk pada filsafat politik John Locke, dikatakan memiliki State of nature yang berkarakter positif. dalam hal ini, manusia dapat menerima dengan baik hubungan relasional antar individu. ketika rasional ini berjalan dengan baik, logika, bahwa sistem sosial yang menggerakkan seluruh warga untuk saling menghormati, memberikan rezeki kepada otoritas orang tua, memberikan penghargaan yang tinggi pada ilmu pengetahuan, menghormati undang-undang yang dibuat oleh politisi, mematuhi aturan hukum yang ditetapkan, mempercayai pejabat-pejabat pemerintah yang menjabat dan macam sebagainya. nya apabila memang individu dan warga masih menganggap cukup beralasan dan masuk akal untuk menghormati persoalan-persoalan tersebut. konsekuensinya adalah bahwa manusia memang telah dididik secara moral untuk bersedia mematuhi hukum dan perundangan sebagai suatu hal yang benar dan baik bag publik.

Penghormatan dan penghargaan pada pemerintah yang lagimate menjadi kunci penting bagi terwujudnya pemenuhan atas pengejawantahan kebijakan publik. warga menghormati pemerintah yang berkuasa oleh karena legitimasinya, maka secara otomatis mereka akan turut pula memenuhi ajakan

pemerintah melalui undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, keputusan pemerintah, ataupun yang lainnya.

2. Adanya Kesadaran Untuk Menerima Kebijakan

Pemerintah harus mampu mengubah pola pikir warga dengan cara sikap dan perilaku yang sesuai dengan pola pikir yang telah dibentuk oleh aparatur sendiri

3. Adanya Sanksi Hukum

Orang dengan akan sangat terpaksa mengimplementasikan dan melaksanakan satu kebijakan karena ia takut terkena sanksi hukuman, misalnya dan, keruk, dan sanksi sanksi, sanksi sanksi lainnya. Karena itu, salah satu strategi yang sering digunakan oleh aparatur birokrasi dalam upayanya untuk memenuhi implementasi kebijakan publik ialah dengan cara memberikan sanksi hukum yang berat pada setiap kebijakan yang dibuatnya.

Selain itu, orang atau kelompok warga seringkali mematuhi dan melaksanakan kebijakan karena ia tidak suka dikatakan sebagai orang yang melanggar aturan hukum, sehingga dengan terpaksa ia melakukan kebijakan publik tersebut.

4. Adanya Kepentingan Publik

Masyarakat mempunyai keyakinan bahwa kebijakan publik dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh pejabat publik yang berwenang, serta melalui prosedur yang sah yang telah tersedia. Bila suatu kebijakan dibuat berdasarkan ketentuan

tersebut diatas, Maka masyarakat cenderung mempunyai kesediaan diri untuk menerima dan melaksanakan kebijakan itu. apalagi ketika kebijakan itu memang berhubungan erat dengan hajat hidup mereka.

5. Adanya Kepentingan Pribadi

Seseorang atau kelompok orang sering mempengaruhi keuntungan langsung dari suatu proyek implementasi kebijakan, maka dari itu dengan senang hati mereka akan menerima, mendukung dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan.

6. Masalah Waktu

Apabila masyarakat memandang suatu kebijakan yang bertolak belakang dengan kepentingan publik, Maka warga akan berkecenderungan menolak kebijakan tersebut tetapi begitu berjalannya waktu, pada akhirnya suatu kebijakan yang dulunya pernah ditolak dan dianggap kontroversional, berubah menjadi kebijakan yang wajar dan dapat diterima.

7. Koordinasi Antar-Lembaga Atau Antar-Organisasi

Implementasi kebijakan tidak jarang melibatkan banyak kebijakan dan *stakeholder*. Oleh karena itu, koordinasi merupakan elemen penting dalam menilai keefektifan suatu implementasi. Terkadang suatu kebijakan dianggap baik dalam segi konten tapi lemah dalam segi pelaksanaan. realita ini

sangat mungkin terjadi karena koordinasi antarlembaga atau antar organisasi yang seharusnya menjalankan dan atau mengawasi justru tidak melaksanakan koordinasi tersebut. padahal apabila koordinasi itu dilakukan bukan tidak mungkin suatu masalah publik dapat diselesaikan dengan segera.

2.2.5. Faktor Penentu Penolakan atau Penundaan Implementasi Kebijakan

1. Adanya Kebijakan Yang Bertentangan Dengan Sistem Nilai Yang Mengada

Bila suatu kebijakan dipandang bertentangan secara ekstrim atau secara tajam dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat secara luas, atau kelompok-kelompok tertentu secara umum, maka dapat dipastikan kebijakan publik yang hendak diimplementasikan akan sulit terlaksana.

2. Tidak Adanya Kepastian Hukum

Ketidakjelasan aturan-aturan hukum, atau kebijakan-kebijakan yang saling bertentangan satu sama lain dapat menjadi sumber-sumber ketidakpatuhan warga pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. Adanya Keanggotaan Seseorang Dalam Suatu Organisasi

Seseorang yang tidak atau patuh pada peraturan atau kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah dapat disebagikan keterlibatannya dalam suatu organisasi tertentu. jika tujuan organisasi yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berpikiran selaras dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, maka orang tersebut bersedia untuk melakukan ketetapan pemerintah itu dengan tulus. Tetapi, jika tujuan organisasi yang dimasukinya bertolak belakang dengan ide dan gagasan pemerintah, sebagai apapun kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah akan sulit terimplementasi dengan baik

4. Adanya Konsep Ketidakpatuhan Selektif Terhadap Hukum

Sebagian besar masyarakat yang patuh pada suatu kebijakan tertentu, namun melanggar pada suatu kebijakan yang lainnya.

2.3. Penertiban Pedagang Kaki Lima

2.3.1. Pengertian Penertiban

Penertiban Pedagang Kaki Lima adalah cara atau perbuatan yang dilakukan pemerintah daerah dengan melakukan pembinaan, memeriksa, dan menindak para PKL agar mau untuk berpindah tempat lokasi berjualan yang tidak dibolehkan untuk berjualan ke tempat yang telah

disediakan oleh pemerintah dengan memperhatikan kepentingan umum, keamanan, ketertiban, kenyamanan, dan kebersihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu menurut UU 23/2014 Pasal 255 ayat (2) huruf a:

melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada

Yang dimaksud dengan “tindakan penertiban non-yustisial” adalah tindakan yang dilakukan oleh SatPol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.